

# Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi untuk generasi muda Indonesia

Muhammad Wendry Prayoda

Program Studi Manajemen/Jurusan Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: wewen111111@gmail.com

## Kata Kunci:

Pancasila; Pendidikan; Anti Korupsi; Generasi Muda; Integritas.

## Keywords:

Pancasila; Education; Anti-Corruption; Young Generation; Integrity.

## ABSTRAK

Korupsi tetap menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan nasional serta merusak karakter bangsa. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus didukung oleh pendidikan moral dan pembentukan karakter sejak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam pengembangan pendidikan antikorupsi bagi generasi muda Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menggali berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan institusi antikorupsi, dan referensi

akademik lainnya. Temuan penelitian menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan jiwa kebersamaan, memiliki hubungan erat dalam membentuk karakter antikorupsi. Mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum pendidikan, pembiasaan perilaku jujur, serta melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dapat memperkuat integritas generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi yang berlandaskan Pancasila merupakan langkah strategis yang efektif untuk mencetak generasi penerus bangsa dengan kepribadian berintegritas, bermoral tinggi, dan memiliki komitmen terhadap terciptanya Indonesia yang bebas dari korupsi.

## ABSTRACT

Corruption remains a serious problem that hinders national development and damages the character of the nation. Efforts to eradicate corruption cannot rely solely on law enforcement, but must also be supported by moral education and character building from an early age. This study aims to examine the role of Pancasila values as a foundation in the development of anti-corruption education for Indonesia's younger generation. Using a qualitative descriptive method through a literature study approach, this research explores various sources such as scientific journals, anti-corruption institution reports, and other academic references. The findings of the study state that Pancasila values, such as honesty, responsibility, justice, and a spirit of togetherness, are closely related to shaping an anti-corruption character. Integrating these values into the education curriculum, instilling honest behaviour, and involving the active role of families and communities can strengthen the integrity of the younger generation. Therefore, anti-corruption education based on Pancasila is an effective strategic step to produce a future generation with integrity, high morals, and a commitment to creating a corruption-free Indonesia.

## Pendahuluan

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia sejak lama. Perubahan nilai-nilai moral dan budaya masyarakat sebelum era modern memberi dampak pada munculnya praktik korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini membuat cita-cita dan tujuan bangsa sulit terwujud karena masyarakat tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pancasila. Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan upaya pemulihan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lapisan masyarakat terbawah hingga pejabat negara.

Mahasiswa menjadi garda depan untuk menjadi pimpinan di masa depan diharapkan untuk bersih dari tindakan korup. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sejumlah mahasiswa justru berani melakukan tindakan korup. Falah (2012) berpendapat, mahasiswa menganggap tindakan korup dari orang lain sebagai tindakan negatif. Akan tetapi, penilaian mahasiswa akan tindakan korup menjadi lebih toleran, apalagi jika tindakan korup tersebut melibatkan diri mereka. Hal ini menjadikan sangat penting untuk mengajarkan nilai antikorup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada mahasiswa yang sedang perkuliahan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016). Sebagai salah satu bukti nyata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek-Dikti, dan Kementerian Agama RI memiliki kesepakatan untuk mengimplementasikan kurikulum antikorupsi dari jenjang Sekolah/Madrasah hingga Pendidikan Tinggi pada tahun 2019 (Koran Sindo, 2018).

Masa depan sebuah negara bergantung pada peran generasi muda yang menjadi tonggak perubahan dan pembentukan karakter bangsa. Dengan potensi besar untuk membawa perubahan dunia, nilai-nilai moral dan etis yang dimiliki generasi muda akan menentukan arah perkembangan bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai yang tepat agar mereka memiliki dasar moralitas yang kokoh. Penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui pendekatan pendidikan formal maupun non-formal merupakan langkah yang strategis dalam membangun pemahaman tentang integritas, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Selain institusi pendidikan, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam membentuk nilai-nilai moral anak-anak. Melalui interaksi sehari-hari, keluarga berkontribusi menciptakan sikap dan perilaku berdasarkan prinsip-prinsip mulia.

### **Korupsi di Indonesia**

Korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia. Sejak masa kolonial Belanda, praktik ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Pada tahun 1602, salah satu kemitraan komersial Belanda mengalami kebangkrutan akibat maraknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan pedagang. Setelah Indonesia merdeka, perilaku korupsi tidak hilang, melainkan semakin berkembang karena lemahnya sistem hukum, rendahnya pengawasan, serta kecenderungan manusia yang tidak pernah puas. Fenomena tersebut membuat korupsi menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pejabat tinggi. Akibatnya, pembangunan bangsa terhambat, keadilan sosial sulit terwujud, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah moral dan budaya yang sudah berurat akar. Korupsi adalah ancaman nyata terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlunya strategi yang komprehensif dalam mengatasi korupsi, salah satunya yaitu melalui pembelajaran Pancasila (Dhea Ananda Riandy Putri et al., 2025) Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan pendekatan yang tidak

hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran penting. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, dapat dijadikan fondasi pendidikan anti korupsi untuk membentuk generasi muda berintegritas dan siap menjadi agen perubahan. (Moh. Ali Hofi, 2024)

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi korupsi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar pendidikan anti korupsi?
3. Bagaimana penerapan pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila bagi generasi muda Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kondisi korupsi di Indonesia saat ini.
2. Mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar pendidikan anti korupsi
3. Mengidentifikasi penerapan pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila bagi generasi muda Indonesia

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga anti korupsi, dan artikel terpercaya. Analisis dilakukan dengan cara menelaah teori, membandingkan hasil penelitian terdahulu, dan menarik kesimpulan mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan anti korupsi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kondisi Korupsi Di Indonesia**

Kenyataan yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah kronis yang belum menunjukkan penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2023 jumlah kasus korupsi justru meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tercatat ada 691 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum dengan total kerugian negara lebih dari Rp42 triliun, naik dari 405 kasus pada tahun 2022 dengan kerugian sekitar Rp39 triliun. Memasuki tahun 2024, Kejaksaan Agung melaporkan total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp310,61 triliun, termasuk skandal besar di sektor pertambangan timah senilai sekitar Rp300 triliun. Sementara itu, pada awal 2025, kembali terungkap dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Chromebook senilai Rp9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung. (Luh et al., 2025)

Laporan terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih menjadi isu serius dengan tren yang

mengkhawatirkan. Selama semester pertama tahun 2025, KPK menerima sebanyak 2.273 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun, sekitar 254 laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti pada tahap verifikasi karena kekurangan data. Sementara itu, sepanjang tahun 2023, KPK mencatat 5.079 laporan pengaduan, di mana 690 laporan harus dibatalkan akibat minimnya bukti yang mendukung. Di tahun 2024, KPK menetapkan 163 individu sebagai tersangka dalam 142 kasus korupsi. Pada periode yang sama, tercatat total 1.666 kasus korupsi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut melibatkan 1.680 pelaku laki-laki dan 155 pelaku perempuan. Di sisi lain, tingkat kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama periode 2020–2024 menunjukkan angka rata-rata yang cukup tinggi, yakni mencapai 96,67 persen. Namun demikian, meskipun tingkat kepatuhan administratif meningkat, penurunan jumlah kasus korupsi masih belum terlihat secara signifikan. Dengan kondisi ini, pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Pancasila tetap menjadi kebutuhan yang mendesak demi mendorong perubahan yang lebih nyata.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih kuat mengakar dalam birokrasi dan menjadi ancaman serius terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Pemerintah menjawab kondisi tersebut dengan menerapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menguatkan pendidikan antikorupsi. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang menjadikan integritas sebagai satu dari lima nilai utama karakter bangsa. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga dimasukkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendukung pelaksanaannya dengan menyusun modul pembelajaran antikorupsi serta memberikan pelatihan khusus bagi para pendidik di berbagai jenjang pendidikan.

### **Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Anti Korupsi**

Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila memiliki peran penting dalam memberikan landasan moral dan etika untuk mencegah serta memberantas korupsi di Indonesia. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap keimanan kepada Tuhan. Melakukan korupsi berarti mengabaikan nilai-nilai kejujuran yang seharusnya kita junjung sebagai makhluk yang beriman. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mengajarkan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan keadilan, martabat, dan rasa hormat. Tindakan korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai ini karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kedudukan untuk keuntungan pribadi, yang justru merugikan orang lain. Korupsi mencerminkan ketidakadilan dan perilaku yang jauh dari sifat beradab. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menyiratkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Ketika seseorang melakukan tindakan korupsi, ia secara langsung mencederai prinsip persatuan dan kesetaraan, karena tindakannya menciptakan kesenjangan sosial, perpecahan, serta merusak kepercayaan terhadap hukum dan negara. Dengan demikian, setiap tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melanggar

nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Sapto & Ciptono, 2022).

#### **Sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”**

Pada sila pertama ini menegaskan tentang pentingnya keimanan dan kepercayaan masing-masing masyarakat Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa. Jika seseorang melakukan korupsi, maka hal itu mencerminkan pengingkaran terhadap Tuhan.

#### **Sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”**

Korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menuntut penghormatan terhadap persamaan hak dan derajat manusia.

#### **Sila ketiga, yaitu “Persatuan Indonesia”**

Perilaku korupsi merupakan cerminan dari seseorang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa adanya niat untuk berkontribusi demi bangsa dan negara. Selain itu, tindakan semacam ini juga menunjukkan minimnya rasa cinta kepada tanah air, karena pelaku lebih mengutamakan kepuasan diri dan keuntungan pribadi di atas kepentingan bersama.

#### **Sila keempat, yaitu “Rakyat Dipimpin oleh Kebijakan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”**

Korupsi merupakan perilaku yang menunjukkan pengambilan keputusan secara sepihak tanpa mempedulikan nilai musyawarah dan semangat kebersamaan. Dalam setiap tindakan maupun keputusan, seharusnya terjadi kesepakatan bersama agar kebaikan untuk semua pihak dapat tercapai.

#### **Sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”**

Bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia adalah nilai yang sangat penting untuk dijaga. Namun, praktik korupsi justru mencerminkan ketidakadilan, khususnya dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

#### **Pendidikan Anti Korupsi untuk Generasi Muda**

Korupsi terjadi akibat adanya faktor internal dan eksternal. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan mengatasi kedua faktor penyebab tersebut. Salah satu langkah preventif yang efektif adalah menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Apabila nilai-nilai antikorupsi tertanam dengan kuat dalam diri individu, hal ini akan menjadi penghalang yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Nilai-nilai antikorupsi meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Pendidikan antikorupsi adalah perpaduan antara pengajaran karakter dan nilai-nilai moral. Karakter tersebut berakar pada sikap jujur, integritas, dan kepribadian yang mulia. Penting bagi pendidikan ini untuk diterapkan sejak usia dini, mengingat potensi terjadinya perilaku negatif di masa mendatang. Dunia pendidikan memegang peran besar dalam mencetak generasi yang berintegritas, bebas dari korupsi, serta berakhlak mulia. (Gufon et al., 2022) Hal ini selaras dengan konsep pendidikan yang dijelaskan dalam buku *Identitas Nasional* (2024),

yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, moral, serta tanggung jawab sebagai warga negara untuk memperkokoh jati diri bangsa

Pendidikan antikorupsi bukan sekadar upaya untuk mencegah praktik korupsi, tetapi juga bertujuan membangun karakter yang lebih kuat dan menyeluruh. Nilai-nilai integritas yang ditanamkan melalui pendidikan antikorupsi dapat membentuk generasi muda dengan prinsip hidup yang teguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, pendidikan ini mendorong tumbuhnya karakter positif lain, seperti rasa tanggung jawab, kerja keras, dan kedisiplinan, sebagai hasil dari penerapan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya menciptakan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral tinggi serta berkomitmen pada kebaikan sosial.

Agar tujuan ini tercapai, pendidikan antikorupsi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, bahkan keluarga, memainkan peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak dan remaja. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran ini. Seperti ditegaskan dalam buku *Identitas Nasional* (2024), pendidikan berbasis budaya dan nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membentuk warga negara yang berkarakter kuat, jujur, dan berkomitmen menjaga integritas bangsa. Kerjasama yang terjalin baik antar pihak akan melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki kecerdasan moral dan etika yang mendalam. (Bintang Auliya Tyananda et al., 2025)

Adapun tujuan dilaksanakannya pendidikan antikorupsi di sekolah antara lain:

- a. Menanamkan nilai-nilai dan sikap hidup antikorupsi di lingkungan sekolah berarti membangun kebiasaan di mana seluruh warga sekolah mengutamakan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas, baik dalam proses belajar maupun ketika berorganisasi. Guru berperan sebagai panutan, sementara siswa dibimbing untuk menolak segala bentuk kecurangan dan memiliki keberanian untuk bersikap jujur.
- b. Menanamkan kebiasaan antikorupsi berarti mengajarkan warga sekolah untuk selalu bersikap jujur, disiplin, serta tidak menyalahgunakan kepercayaan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan pendidikan.
- c. Meningkatkan kreativitas warga sekolah dalam menginternalisasi dan mempraktikkan perilaku antikorupsi melibatkan upaya mendorong guru dan siswa untuk menghasilkan berbagai aktivitas atau karya inovatif. Contohnya adalah membuat poster, menyelenggarakan drama, atau melakukan kampanye yang berfokus pada penanaman nilai-nilai kejujuran dan integritas di lingkungan sekolah. (Gufon et al., 2022)

## Kesimpulan dan Saran

Pancasila memiliki peranan penting sebagai landasan dalam pendidikan antikorupsi di Indonesia, karena nilai-nilainya menjadi panduan moral untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas. Melalui pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila,

generasi muda dapat dibentuk menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat karakter positif seperti keadilan, kerja keras, dan empati terhadap sesama. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aktivitas pembelajaran. Di sisi lain, keluarga dan masyarakat juga berperan penting sebagai teladan dalam menanamkan nilai kejujuran serta integritas. Selain itu, pemerintah diharapkan semakin memperkuat kebijakan dalam pendidikan karakter sambil memanfaatkan media dan teknologi digital untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan pendidikan antikorupsi berbasis Pancasila mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, memiliki integritas tinggi, serta berkomitmen mendukung terciptanya Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.

## Daftar Pustaka

- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Gufron, Gufron, Chamidah, Dewi and Firdausi, M. Anwar (2022) *Pendidikan anti korupsi berbasis islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Islamic-based anti-corruption education to build integrity zones among Ma'had al-Jami'ah students at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*. Research Report. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang. (Submitted). <https://repository.uin-malang.ac.id/13574/>
- Hofi, M. A. (2024). *Membentuk karakter anti korupsi pada generasi muda dengan nilai-nilai luhur Pancasila*. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 333–343. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.663>
- Mulyoto, Galih Puji (2020) *Pengembangan modul praktikum matakuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa*. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17 (1). pp. 67-80. ISSN 2541-1918. <https://repository.uin-malang.ac.id/5730/>
- Putri, D. A. R., Srihayuning, W., Yulianingsih, I., Hudi, I., Putri, M. A., Putri, M. D., & Putri, G. (2025). *Pentingnya pengetahuan mengenai anti korupsi pada generasi muda Indonesia melalui pembelajaran Pancasila*. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 3(1), 67–77. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i4.4629>
- Sacipto, R., & Ciptono. (2022). *Pembentukan karakter anti korupsi berlandaskan ideologi Pancasila*. *Jurnal (Volume 3, Nomor 1, Tahun 2022)*, 39–50. E-ISSN: 2776-0774.
- Tyananda, B. A., Prayoga, R. D., Ester, T., et al. (2025). *Pendidikan antikorupsi sebagai upaya membangun generasi berintegritas*. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia (JUPENKEI)*, 2(1), 104–113. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i1.161>
- Yasmianti, N. L. W., Parwata, I. G. L. A., Ratnaya, I. G., & Budhayani, I. D. A. M. (2025). *Measuring integrity: How should anti-corruption education assessment be conducted in schools?* *SHS Web of Conferences*, 221, 03019. EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103019>